

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang & Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Rakyat;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaiman diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 15 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

Peraturan Bupati Ketapang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

#### **Buku**

Aditia Syaprillah, 2016. “Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan”, Bina Hukum Lingkungan Volume 1.

Adrian Sutedi, 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika.

Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia.

Ali, Ahmad, 2002. Menguak Tabir Hukum, PT. Gunung Agung, Jakarta.

Bachsan Mustafa, 1990. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bagir Manan, 1995. Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945. Jakarta.

Bambang Sutiyo, 2010, Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.

- Boateng, D.O., Codjoe, F.N.Y. and Ofori, J, 2014. Impact of Illegal Small Scale Mining (Galamsey) on Cocoa Production in Atiwa district of Ghana. *International Journal of Advance Agricultural Research*, 2, 89-99.
- E. Utrecht, 1957. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar.
- Erwin Muhammad, 2011. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Helmi. 2012. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Jakarta Sinar Grafika.
- I.S. Susanto, 2011. Kriminologi, Genta Publishing. Yogyakarta.
- Iskandar, 2010. Pertambangan di Indonesia. Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- Ivan Fauzani Raharja dan Ratna Dewi, 2013. Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi seri Humaniora*.
- J.B. Daliyo, 1994. Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jonathan Sarwono, 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kansil, 1982. Pengantar Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Katalog, Kecamatan Air Upas Dalam Angka 2019, Kementerian ESDM
- Kurniawan, A.R dan Surono, W, 2013. Model Reklamasi Tambang Rakyat Berwawasan Lingkungan : Tinjauan Atas Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batu Apung Ijobalit, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Vol 9 (3): 165-174*.
- M. Laica Marzuki, 2006. Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekretariat Jendral & Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Mashuri Mashab, 2013. Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta.

- Muhammad Akib dan Muhtadi, 2012, "Model Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Pendekatan Ekosistem", *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5,
- Nur Dyahwanti Inarni., 2007. *Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Di Daerah Gunung Sumbing (Studi Kasus Di Desa Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung* Tesis MIL UNDIP.
- Otto Soemarwoto, 2009. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Paton, G.W., 1972. *A Textbook Of Jurisprudence*, English Language Book Society. Oxford University Press. London.
- Ridwan, HR, 2006. *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan HR, 2011. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sadjijono, 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta.
- Salim, 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Salim HS, 2014. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Siti Sundari Rangkuti, 2015. *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press Surabaya, 6 Januari 2015: Edisi Keempat.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soeroso, R, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo, 1987. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta.
- Suhartono dkk, 2000. *Parlemen Desa (Dinamika DPR Kalurahan Dan DPRK Gotongroyong)*, Cetakan Pertama, Laperapustaka Utama, Yogyakarta.
- Supramono, Gatot, 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Suteki dan Galang Taufani, 2018. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), Depok: Rajagrafindo Persada.

Ukut. 2021. Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Batubara Ilegal Ditinjau Dari Perspektif Hukum. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*.

Widjaja, HAW, 2012. Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Wira Fuji Astuti, 2015. Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil. Departemen Sains Komunikasi dan

